Berita	:	Dewan Minta BUMD Diaudit
Entitas / Cakupan	:	Kabupaten Bandung Barat
Sumber / Hal	:	Radar Bandung/Hal.6
Edisi	:	Rabu, 17 Januari 2018

Dewan Minta BUMD Diaudit

PADALARANG - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Dadan Supardan meminta secara tegas BUMD PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS) diaudit. Hal ini terkait dengan persoalan hukum yang sedang dihadapinya dan ancaman akan disitanya aset perusahaan plat merah tersebut oleh pihak pengadilan akibat bermasalah dengan pihak ketiga.

"Jujur saya kaget. Tahu BUMD bermasalah itu dari pemberitaan. Ini harus dipertanggungjawabkan," tegasnya kemarin.

Dadan tidak menyangka jika PT PMgS memiliki utang yang harus dibayar ke pihak ketiga sebesar Rp8 miliar. Ini dikarenakan selama ini komisaris dan direksi BUMD tidak pernah terbuka atau menyampikan jika mereka sedang terlilit masalah. Sebaliknya mereka justru selalu menyampaikan klaim prestasi dan keberhasilan yang selalu dibangga-banggakannya.

"Selama ini yang diomongkan adalah prestasi ini, capaian itu, dan yang lainnya. Tapi kenyataannya bermasalah. Tidak bener ini, harus dilakukan audit investigatif," tegas Dadan.

Untuk itu komisinya meminta agar jangan sampai persoalan ini berlarut-larut. Karena bagaimana pun aset milik BUMD itu adalah milik pemerintah daerah yang dibeli oleh uang APBD. Selama ini total Pemkab Bandung Barat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp35 miliar kepada BUMD.

"Semua harus clear jangan ada yang ditutup-tutupi. Utang Rp8 miliar itu tidak sedikit, jadi mereka (direksi dan komisaris) BUMD tidak boleh mundur atau diganti sebelum persoalan ini selesai," kata politisi Partai Golkar ini.

Terpisah, Pemkab Bandung Barat meminta direksi BUMD PT PMgS bertanggung jawab terhadap permasalahan aset yang dihadapi. Jika BUMD tersebut sampai kehilangan aset daerah maka direksi perusahaan harus menggantinya secara pribadi.

"Direksi harus tanggung jawab, itu bisa dipidanakan oleh pemerintah daerah. Landasannya undang-undang perseroan terbatas kalau memang ada penyimpangan," ucap Kepala Bagian Perekonomian Sekretarian Daerah Kabupaten Bandung Barat, Eriska Hendrayana.

Dia menyebutkan PT PMgS diberikan keleluasaan mengelola aset yang berupa modal. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. "Pemkab Bandung Barat hanya berkepentingan dalam kepentingan yang menyangkut pemegang saham. Tapi secara legalnya pemerintah daerah tidak ikut campur," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) Jawa Barat Eka Suwarna menyatakan, jika BUMD merugi itu hal biasa. Tapi tidak biasa dalam kasus BUMD PT PMgS karena kemudian menyisakan masalah hukum yang berbuntut rencana penyitaan aset BUMD yang notabene adalah aset daerah.

"Suntikan modal Rp35 miliar dari APBD itu saja belum dipertanggungjawabkan, sekarang juatru muncul masalah hukum berupa gugatan utang oleh pihak ketiga sebesar Rp8 miliar," ucapnya.

Dirinya menilai, dalam kondisi ini harus segera dilaksanakan RUPS luar biasa untuk mengevalusi kinerja direksi untuk menyelamatkan aset milik daerah. DPRD harus segera meminta pertanggungjawaban pemegang saham dan direksi BUMD khususnya atas penggunaan dana Rp35 miliar dan laksanakan audit oleh auditor independen yang terpercaya.

"Pemerintah daerah juga harus menyetop kucuran modal pada BUMD yang sakit ini serta membentuk tim profesional utk melakukan pendampingan," terangnya.

Seperti diketahui aset BUMD PT PMgS terancam disita Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB) Kabupaten Bandung. Pasalnya BUMD yang didirkan pada 2010 ini memiliki utang kepada mitra perusahaan yang telah membangun dan membiayai fasilitas penyaluran air dari sumber mata air Cijanggel ke reservoir Muril di Kecamatan Cisarua, KBB, PT Bravo Delta Persada, senilai Rp8 miliar. **(bie)**